

Kolektivitas dalam Nomenklatur Pendidikan Moral di Korea Selatan

Diaz Putri Amelia^{a,1*}, Dinie Anggraeni Dewi^{a,2}

^a Universitas Pendidikan Indonesia

¹ dzputriamelia@upi.edu*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 16 Juli 2021;

Revised: 2 Agustus 2021;

Accepted: 3 Agustus 2021

Kata kunci:

Pendidikan

Kewarganegaraan;

Korea Selatan.

: ABSTRAK

Pada dasarnya, setiap negara di dunia akan selalu mengembangkan konsep terbaik untuk mewujudkan cita-cita dan aspirasi bangsa, termasuk di bidang Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan di setiap negara berbeda karena dipengaruhi oleh perkembangan sejarah, latar belakang, kondisi budaya, sistem sosial, ekonomi masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pendidikan Kewarganegaraan di Korea Selatan. Pemilihan Korea Selatan sebagai objek penelitian dilatarbelakangi karena pendidikan di Korea Selatan telah diakui dunia sebagai sistem yang unggul. Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan di Korea Selatan mengadopsi konsep Pendidikan Kewarganegaraan di Asia. Korea Selatan menerapkan pendidikan nilai dan moral dengan menggunakan pendekatan terpisah yang berasal dari budaya dan religius. Budaya di sini yang dimaksud yaitu kolektivisme yang berasal dari Konfusianisme dan keyakinan yang merupakan agama leluhur. Warga Korea Selatan secara umum sering memperhatikan pendidikan guru-guru karena mereka meyakini bahwasannya kualitas dari pendidikan moral juga sangat ditentukan oleh kualifikasi pendidikan para guru.

Keywords:

Citizenship Education;

South Korea.

ABSTRACT

Collectivity in the Nomenclature of Moral Education in South Korea. Basically, every country in the world will always develop the best concept to realize the ideals and aspirations of the nation, including in the field of civic education. Citizenship education in each country will always be different because it is influenced by historical developments, backgrounds, cultural conditions, social systems, and the economy of the people in each country. This article aims to analyze citizenship education in South Korea. The choice of South Korea as an object of research was motivated because education in South Korea has been recognized by the world as a superior system. The type of research used in this article is a literature study. The results showed that citizenship education in South Korea originated from culture and beliefs, namely Confucian culture and ancestral religion. South Koreans in general often pay attention to teachers because they believe that the quality of moral education is also largely determined by the educational qualifications of teachers.

Copyright © 2021 (Diaz Putri Amelia & Dinie Anggraeni Dewi). All Right Reserved

How to Cite : Amelia, D. P., & Dewi, D. A. (2021). Kolektivitas dalam Nomenklatur Pendidikan Moral di Korea Selatan. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(8), 264–270. <https://doi.org/10.56393/decive.v1i8.266>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan ruang belajar bagi individu dalam kehidupan di ruang publik. Hal ini mengharuskan setiap individu untuk menjadi warga negara yang baik dengan berpartisipasi sebagai warga negara. Dalam mencapai tujuan tersebut, pembelajaran menjadi penting karena memuat Pendidikan Kewarganegaraan perlu diajarkan kepada generasi muda. Permasalahan yang terjadi di kawasan Asia Timur adalah permasalahan sejarah di masa lalu yang mana melibatkan beberapa negara seperti Jepang, Cina, dan Korea Selatan. Hubungan sejarah dari ketiga negara ini penuh ketegangan, dimana Jepang tidak pernah mau mengakui segala macam tindak kejahatan yang terjadi pada masa perang dunia kedua. Oleh karena itu, persaingan antara ketiga negara ini menjadi sangat kompetitif dalam segala bidang di dunia Internasional terutama dalam bidang ekonomi. Berbeda dengan kawasan lain yang ada di Asia, kekuatan wilayah Asia Timur mampu mewarnai politik internasional serta mengimbangi kekuatan barat, dan menjadikan mereka berusaha untuk saling berebut pengaruh satu sama lain (Purwanto, 2010).

Perkembangan yang telah dicapai negara tidak lepas dari kapabilitas sumber daya manusia (SDM) (Stewart, 2019). Kapabilitas itu terbentuk melalui sistem-sistem pendidikan. Contohnya, negara Amerika memanfaatkan pendidikan untuk bisa mengatasi masalah sosial dan negara China menggunakan pendidikan mereka sebagai sarana untuk membentuk individu yang setia serta mendedikasikan dirinya untuk membangun masyarakat. Pendidikan di Korea Selatan berperan penting dalam pengembangan masyarakat demokratis. Selain itu, Korea Selatan memanfaatkan sekolah-sekolah untuk ajang mempromosikan kesetiaan dan legitimasi kepada negara serta mempromosikan nilai-nilai demokrasi liberal (Seth, 2012).

Korea Selatan terkenal dengan tingkat kemajuan Industri yang cukup pesat, dimana Korea Selatan meraih posisi ke-11 dari 50 negara berdasarkan hasil ranking statistics times. Selain itu, sebagai salah satu Macan Asia, Korea Selatan telah berhasil mencapai rekor pertumbuhan yang meningkat. Berdasarkan Data World Economic Outlook (WEO) pada bulan April tahun 2019 menunjukkan Gross Domestic Product (GDP) Korea Selatan 2,6%. Pencapaian ini tentu tidak terlepas dari partisipasi para warga negaranya. Partisipasi dari warga negara merupakan perwujudan iklim demokrasi dalam rangka membangun negara. (Bayeh, 2016). Beberapa negara bahkan telah mengakui bahwa warga yang loyal dan partisipatif dapat dibentuk melalui pendidikan kewarganegaraan (Seth 2012; Weinberg & Flinders, 2018).

Pendidikan kewarganegaraan telah memberikan pemahaman dan keterampilan anak untuk aktif terlibat serta bertanggungjawab dalam lingkungan politik, media, masyarakat sipil, ekonomi bahkan hukum. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting untuk setiap negara agar dapat mewujudkan warga yang positif, bertanggung jawab, dan juga mandiri (Enyiaka, dkk. 2018). Artikel ini dibuat untuk tujuan membahas tentang Pendidikan Kewarganegaraan di negara Korea Selatan. Selain karena memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, Pemilihan Korea Selatan sebagai objek penelitian dilatarbelakangi karena pendidikan di Korea Selatan telah diakui dunia sebagai sistem yang unggul. Pendidikan kewarganegaraan di kawasan Asia erat kaitannya dengan penanaman kolektivisme. Contoh penerapan kolektif ini sendiri adalah adanya panduan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa sikap yang ditanamkan di negara-negara Asia umumnya yaitu mendorong apresiasi terhadap warisan budaya, penguatan identitas nasional, dan juga mendorong nilai kekeluargaan.

Bahmuller (1996) mengungkapkan tentang *citizenship/civic education* di suatu negara bisa dilihat dengan menggunakan konsep / teori perkembangan demokrasi. Ia juga mengungkapkan bahwa perkembangan demokrasi itu tergantung pada sejumlah faktor, yaitu: tingkat perkembangan ekonomi, aspek sosial politik, dan faktor yang ketiga yakni *civic culture and history*. Perbedaan dari dua faktor terakhir bahwa aspek sosial politik ini memuat identitas nasional yang berupa persatuan dan kesatuan bangsa, sedangkan *civic culture and history* memuat aspek pengalaman sejarah serta budaya kewarganegaraan. Ketiganya menjadi sebuah landasan penting bagi perkembangan demokrasi. Selain

itu, demokrasi juga didasarkan pada konsep hak asasi manusia yang mana konsep kebebasan dikembangkan. Hak asasi manusia, hak individu, dan demokrasi adalah konsep yang penting dalam diskusi kewarganegaraan.

Konsep tersebut oleh Winataputra (2017) dijadikan sebagai suatu pendekatan untuk memahami suatu negara bahwasanya untuk bisa memahami suatu negara dibutuhkan pendekatan lain, yang mana secara langsung melihat kondisi suatu negara itu berdasarkan pendekatan tertentu. Pendekatan tersebut yaitu melihat sejarah suatu negara dari berbagai sudut pandang yang merupakan inti dari kehidupan bernegara. Memahami kondisi negara dapat dilakukan dengan menggali informasi-informasi berdasarkan empat hal, yaitu perkembangan sejarah, perkembangan ekonomi, identitas nasional dan juga budaya kewarganegaraan. Dengan empat hal tersebut selain dapat digunakan untuk memahami civic education di suatu negara juga dapat digunakan untuk menganalisis perbandingan pendidikan kewarganegaraan di beberapa negara.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan. Metode ini lebih Sugiono mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian. Metode deskriptif ditunjukkan untuk mencari makna dengan interpretasi yang tepat sehingga penelitian ini bisa mendeskripsikan suatu gejala dan juga peristiwa yang terjadi pada saat sekarang atau masalah aktual. Melihat tujuan tersebut, diharapkan penelitian ini bisa lebih menjelaskan kepada masalah yang hadir dalam hal yang dibahas yaitu kehidupan mahasiswa.

Hasil dan Pembahasan

Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebuah nilai yang telah terpatri di dalam diri seseorang melewati pengalaman, pendidikan, pengorbanan, percobaan, serta pengaruh lingkungan yang lantas dipadupadankan dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri seseorang dan menjadi nilai intinsik yang terwujud di dalam sistem daya juang yang lantas melandasi sikap, perilaku, dan pemikiran seseorang. Secara psikologis dan sosial kultural, pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia secara kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam konteks keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat serta berlangsung sepanjang hayat. Istilah ini juga dihubungkan dengan istilah etika, akhlak, atau nilai yang mana berkaitan dengan kekuatan moral.

Pendidikan di negara Korea Selatan diarahkan agar setiap masyarakat mampu untuk saling mencintai dan menjaga hubungan dengan masyarakat lainnya. Demikian bahwasannya pendidikan mengarahkan setiap individu untuk mencintai kebenaran, dan juga berlaku adil. Bukan hanya itu, setiap orang juga diharuskan untuk selalu menghargai nilai-nilai yang dibawa setiap orang, bertanggungjawab, serta mandiri untuk bisa membangun negara yang adil.

Kebudayaan Korea telah ada sejak 4000 tahun yang lalu dengan dominasi ideologi dan falsafat confusius menjadi terancam dikarenakan terus bergantinya penguasa di Semenanjung Korea. Namun, dengan berbagai gejolak politik dalam dekade 60-70 an, Korea Selatan dapat tampil dan menunjukkan sebagai salah satu negara industri di Asia menyusul tetangganya Jepang. Pendidikannya juga telah berkembang sangat pesat walaupun mengalami cukup banyak tantangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pendidikan di suatu negara secara tidak langsung yaitu salah satunya adalah faktor sejarah. Menurutnya faktor sejarah pertumbuhan masyarakat ini ditentukan oleh tiga hal yang saling berkaitan yaitu pendidikan, kemampuan manusia, dan pertumbuhan ekonomi (Arifin, 2003).

Tipe budaya rakyat di negara Korea Selatan berakar dari kepercayaan mistis atau sihir dan pemujaan pada nenek moyang mereka, keduanya itu mempengaruhi kepercayaan Budha, Confusianisme dan juga Taoisme yang dikenalkan dari luar Korea Selatan, sehingga menurut faktor lain yang mempengaruhi pendidikan kewarganegaraan adalah faktor kehidupan agama. Agama yang dianut oleh masyarakat di negara Korea Selatan menduduki tempat penting dalam sistem kehidupan

masyarakat. Setiap agama memiliki peran penting dalam mempengaruhi sistem kehidupan masyarakatnya.

Selanjutnya, faktor kesukuan atau pengaruh rasialisme di beberapa negara terhadap sistem pendidikan. Kesemuanya itu menyatu secara harmonis dengan pemikiran tradisional, budaya rakyat, budha dan juga konfusianisme berkembang pesat. Hal itu juga mempengaruhi kebudayaan kewarganegaraan. Budaya-budaya tradisional di Korea Selatan harus menyesuaikan dengan budaya modern karena akibat menjadi negara industri, sehingga ada beberapa budaya tradisional yang hilang. Untuk mengembalikan hal tersebut dan juga karena kepercayaan leluhur, menjunjung nilai-nilai luhur menjadi ciri khas dari negara ini, maka muncul pendidikan moral di Korea Selatan.

Pendidikan Kewarganegaraan di Korea Selatan terdapat dalam nomenklatur Pendidikan Moral. Pendekatannya yaitu ditetapkan sebagai inti terpadu serta spesifik (Winataputra, 2015). Selain itu, Landasan atau konsep, instrumentasi dan praksis civic education itu dapat dikaji dalam kurikulum pendidikan moralnya. Menurut reformasi kurikulum nasional ketujuh di Korea Selatan dalam Young-Ran Roh (2004), pendidikan moral itu harus dilaksanakan oleh dua mata kuliah wajib dan tiga mata pelajaran pilihan. Diantaranya, subjek moral diajarkan secara wajib di sekolah dasar, menengah dan atas dari kelas tiga sampai kelas sepuluh serta juga mengklarifikasi pendidikan kewarganegaraan yang demokratis sebagai salah satu dari empat sub-bidang utama (Kementerian Pendidikan Korea Selatan, 1999).

Ada empat fitur dasar yang menjadi bahan pokok moral yang dirancang dalam Kurikulum Nasional ke-7 atau disebut Kurikulum Moral ketujuh antara lain, yaitu: (1) mengadopsi sebagai landasan teoritis untuk dapat mengintegrasikan pendekatan etika kebajikan serta pendekatan kognitif. Pendekatan terpadu ini juga memengaruhi semua area kurikulum yaitu, tujuan atau sasaran, konten, metode pengajaran dan pembelajaran, serta evaluasi; (2) mengikuti prinsip komunitas yang berkembang yang terdiri dari empat area kehidupan yaitu, kehidupan pribadi, kehidupan di keluarga, lingkungan sekolah, kehidupan sosial, kehidupan nasional dan etnis; (3) mencoba menyelaraskan norma-norma moral dan nilai-nilai universal Korea Selatan namun tetap memberi penekanan lebih besar pada yang pertama. Dengan demikian, ia mengadopsi sebagai tujuan pengasuhan warga Korea Selatan yang dibutuhkan daripada manusia yang diinginkan; (4) menetapkan nilai atau kebajikan inti dasar sebagai elemen pengajarannya yang belum pernah dilakukan sampai Kurikulum keenam. Kemudian memilih 20 nilai inti atau kebajikan yang dianggap perlu untuk memimpin empat dimensi kehidupan (lima nilai inti atau kebajikan, yang mana masing-masing untuk empat area kehidupan).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa Pendidikan Kewarganegaraan yang diselenggarakan Korea Selatan berkaitan dengan nilai kolektivisme. Siswa juga diajarkan untuk hidup sebagaimana makhluk sosial yang memiliki peran sebagai individu yang berpartisipasi dalam keluarga, lingkungan sosial, maupun warga negara dengan menjunjung nilai-nilai moral. Hasil ini selaras dengan pernyataan yang menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan mendorong kesadaran sipil. Disamping itu, konsep Pendidikan Kewarganegaraan di negara Korea Selatan ini merujuk pada konsep harmoni yang memuat pendidikan nilai. Konsep harmoni yang dimaksud di sini yaitu nilai-nilai universal yang diperlukan untuk hidup sebagai warga negara yang mana bertujuan mengajarkan norma-norma moral yang diinginkan untuk hidup dan sesuai dengan nilai-nilai pada zaman globalisasi seperti sekarang ini, sehingga pendidikan kewarganegaraan disini menekankan pada penanaman konsep diri untuk mewujudkan hidup yang lebih harmonis (Lee, 2004).

Tetapi selama bertahun-tahun Pendidikan Kewarganegaraan yang demokratis di sekolah-sekolah Korea Selatan telah dikritik karena gagal mengajarkan perilaku dan praktik demokrasi, dan dikecam hanya berkonsentrasi untuk menyampaikan pengetahuan serta mempromosikan pemahaman (Bae, 2000). Berkaitan dengan salah satu tujuan pokok dalam Kurikulum ketujuh yaitu menumbuhkan keterampilan berpikir moral dan penilaian moral, atau keterampilan yang diperlukan untuk memecahkan masalah moral yang diinginkan serta secara rasional dalam kehidupan sehari-hari. Oleh

karena itu, Kurikulum ketujuh ini mendorong guru untuk secara aktif mengenalkan metode investigasi serta diskusi yang berpusat pada siswa dalam praktik di kelas mereka. Selain itu juga, pendidikan kewarganegaraan di Asia berkaitan erat dengan penanaman kolektivisme. Contoh dari penerapan kolektif ini adalah adanya panduan hidup dalam kehidupan sehari-hari.

Di bawah ini beberapa perbandingan Pendidikan Kewarganegaraan di Negara Korea Selatan berdasarkan faktor yang mempengaruhinya, yaitu :

Tabel 1. Faktor yang mempengaruhi Pendidikan Kewarganegaraan Negara Korea Selatan

<i>Historical Experience</i>	Berawal dari kerajaan kemudian menjadi Republic Perang Internal yaitu konflik pecahnya wilayah.
<i>National Identity</i>	Budaya Confusianisme dan Taoisme. Bentuk pemerintahan Republic dan juga menganut demokrasi.
<i>Economic development</i>	<i>Highly of development</i> dan negara industri.
<i>Civic Education</i>	Pendidikan moral bertujuan menumbuhkan keterampilan berpikir dan penilaian moral, serta keterampilan yang diperlukan untuk memecahkan masalah moral secara rasional dalam kehidupan sehari-hari.
<i>Civic Culture</i>	Bagi warga di Korea Selatan, langit merupakan dasar bagi tatanan moral dan landasan hidup yang merasuk ke dalam relung-relung kesadaran umat manusia.

Hasil di atas selaras dengan yang disampaikan oleh Kerr (1999) mengenai konsep pendidikan kewarganegaraan yaitu yang pertama, pendidikan tentang kewarganegaraan yang berfokus untuk memberikan pengetahuan yang cukup akan sejarah nasional, struktur, proses serta kehidupan politik pada pemerintahan. Kemudian yang kedua, pendidikan melalui kewarganegaraan mengajak siswa-siswi untuk terlibat langsung dengan melakukan kegiatan serta berpartisipasi aktif pada pembelajaran di sekolah. Lalu ketiga, pendidikan kewarganegaraan yang dimaksud di sini adalah membekali siswa dengan pengetahuan yang juga dilengkapi oleh instrumen-instrumen yang mendukung dalam pembelajaran seperti halnya keterampilan, bakat, nilai-nilai, dan sikap atau disposisi yang ada di dalam diri siswa tersebut yang mana ini memungkinkan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam menghadapi kehidupan sesungguhnya.

Kemudian, berdasarkan hasil analisis di Korea Selatan dapat disimpulkan bahwasanya negara tersebut telah mengadopsi konsep Pendidikan Kewarganegaraan di Asia. Dipaparkan oleh Kerr (1999) Korea Selatan menerapkan pendidikan nilai dan moral dengan menggunakan pendekatan terpisah yang berasal dari budaya dan religius. Budaya di sini yang dimaksud yaitu budaya konfusianisme dan keyakinan yang merupakan agama leluhur. Kemudian, secara tradisional guru di Korea Selatan mendapatkan penghormatan yang cukup tinggi dari masyarakat. Warga Korea Selatan sangat meyakini terhadap kebenaran suatu pepatah yang bunyinya sebagai berikut: “raja, bapak, dan guru merupakan satu tubuh”. Maka dari itu guru di sana relatif memiliki status sosial yang tinggi sekalipun penghasilannya rendah. Selain itu, warga Korea Selatan secara umum sering memperhatikan pendidikan para guru karena mereka meyakini bahwa kualitas dari pendidikan moral juga sangat ditentukan oleh kualifikasi pendidikan para guru. Maka dari itu, untuk mengantisipasi serta mempersiapkan para guru yang berkualitas, di Korea Selatan dilaksanakan dua jenis dan proses pendidikan, yaitu: pendidikan sebelum menjadi guru dan pendidikan guru.

Untuk program pendidikan sebelum menjadi guru ini, pada akhir tahun 1970 Departemen Pendidikan Etika telah membuka Lembaga pendidikan guru sekolah dan juga sekolah pendidikan di Korea Selatan. Departemen ini khusus mengembangkan program pendidikan yang sistematis yang mana memungkinkan pendidikan moral sebagai pelajaran tersendiri yang diimplementasikan secara baik pada awal tahun 1973. Bagi warga negara di Korea Selatan, jika ingin menjadi guru khususnya guru pendidikan moral harus menempuh pendidikan pada Departemen Pendidikan Etika. Di Korea Selatan, apabila seorang mahasiswa ingin mendaftar pada lembaga pendidikan guru sekolah atau

sekolah pendidikan maka mereka diwajibkan untuk lulus pada tes wawancara dan tes profesi guru. Maksud dari kedua tes ini ialah untuk mengantisipasi terjadi efek negatif dari kepemilikan izin mengajar terhadap siswa yang di didik. Kemudian sampai saat ini, belum dimiliki standar kurikulum untuk guru pendidikan moral di Korea Selatan.

Departemen Pendidikan Etika melalui Lembaga pendidikan guru sekolah dan sekolah pendidikannya telah menggunakan kurikulum sendiri. Meskipun demikian, program-program yang diselenggarakan oleh dewan pendidikan daerah sangatlah ditekankan untuk diikuti oleh guru-guru pendidikan moral sebab hal ini diperlukan untuk bisa mempromosikan guru itu sendiri. Tetapi situasi program pendidikan yang diselenggarakan ini, selama di Korea Selatan dirasa kurang memuaskan karena fasilitas pendidikan yang disiapkan oleh dewan tersebut kurang memadai. Namun terlepas dari situasi historis serta substansi pendidikan moral sebagai pendidikan kewarganegaraan di Korea Selatan, sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwasannya sebagian besar ahli pendidikan di Korea Selatan menyatakan bahwa pendidikan moral sekarang ini telah berjalan lebih efektif meskipun masih terdapat beberapa kendala.

Pendidikan Kewarganegaraan di Korea Selatan terdapat dalam nomenklatur Pendidikan Moral, pendekatannya yaitu ditetapkan sebagai inti terpadu serta spesifik. Selain itu, Landasan atau konsep, instrumentasi dan praksis civic education itu dapat dikaji dalam kurikulum pendidikan moralnya. Menurut reformasi kurikulum nasional ketujuh di Korea Selatan dalam Young-Ran Roh (2004), pendidikan moral itu harus dilaksanakan oleh dua mata kuliah wajib dan tiga mata pelajaran pilihan. Diantaranya, subjek moral diajarkan secara wajib di sekolah dasar, menengah dan atas dari kelas tiga sampai kelas sepuluh serta juga mengklarifikasi pendidikan kewarganegaraan yang demokratis sebagai salah satu dari empat sub-bidang utama (Kementerian Pendidikan Korea Selatan, 1999).

Simpulan

Berdasarkan hal itu, dapat dilihat bahwa Pendidikan Kewarganegaraan yang diselenggarakan Korea Selatan berkaitan dengan nilai kolektivisme. Siswa juga diajarkan untuk hidup sebagaimana makhluk sosial yang memiliki peran sebagai individu yang berpartisipasi dalam keluarga, lingkungan sosial, maupun warga negara dengan menjunjung nilai-nilai moral. Berdasarkan hasil analisis di Korea Selatan dapat disimpulkan bahwas negara tersebut telah mengadopsi konsep Pendidikan Kewarganegaraan di Asia. Korea Selatan menerapkan pendidikan nilai dan moral dengan menggunakan pendekatan terpisah yang berasal dari budaya dan religius. Budaya di sini yang dimaksud yaitu Konfusianisme dan keyakinan yang merupakan agama leluhur. Warga Korea Selatan secara umum sering memperhatikan pendidikan guru-guru karena mereka meyakini bahwa kualitas dari pendidikan moral juga sangat ditentukan oleh kualifikasi pendidikan para guru. Warga negara di Korea Selatan, jika ingin menjadi guru khususnya guru pendidikan moral harus menempuh pendidikan pada Departemen Pendidikan Etika. Lalu, bagi mahasiswa yang ingin mendaftar pada lembaga pendidikan guru sekolah atau sekolah pendidikan maka mereka diwajibkan untuk lulus pada tes wawancara dan tes profesi guru. Maksud dari kedua tes ini ialah untuk mengantisipasi terjadi efek negatif dari kepemilikan izin mengajar terhadap siswa yang di didik.

Referensi

- Almond, G.A. and Verba, S., (2015). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton University Press.
- Arifin, M. (2003). *Ilmu Perbandingan Pendidikan*. Jakarta: Golden Terayon Press
- Bahmuller, C.E., (1996). *The Future of democracy and Education for Democracy*. Calabasas: CCE [Center for Civic Education].
- Bayeh, E. (2016). Role of civics and ethical education for the development of democratic governance in Ethiopia: Achievements and challenges. *Pacific Science Review B: Humanities and Social Sciences*, 2(1), 31-36.

-
- Enyiaka, J.U., Aminigo, I.M., Osaat, S.D. (2018). The Role Of Civic Education In Personality And National Development. *International Journal of Social Science and Humanities Research*. 6(1), 584-589.
- Kerr, D. (1999). *Citizenship Education: An International Comparison*. London: Quali Curriculum Association.
- Lee, W.O., (2004). Concepts and issues of Asian citizenship: Spirituality, harmony and individuality. In *Citizenship education in Asia and the Pacific* (pp. 277-288). Springer Netherlands.
- Lee, W.O., & Grossman, D.L. (Eds.). (2004). *Citizenship education in Asia and the Pacific Concepts and Issues*. Hongkong: The University of Hong Kong Pokfulam. Ministry Of Education & Human Resources Development. 2007-2008. Education in Korea. Republic of Korea
- Michael Seth (2012) Education zeal, state control and citizenship in South Korea, *Citizenship Studies*, 16:1, 13- 28, DOI: 10.1080/13621025.2012.651400
- Purwanto, Adi J. (2010). Peningkatan Anggaran Militer Cina dan Implikasinya Terhadap Keamanan Di Asia Timur. *Ilmu Hubungan Internasional*. Yogyakarta : FISIP UGM.
- Roh, Yang, R., (2004). Values education in the global, information age in South Korea and Singapore. *Citizenship Education in Asia and the Pacific: Concepts and Issues*, 14, p.257.
- Stewart, F. (2019). The Human Development Approach: An Overview. *Oxford Development Studies*, 47(2), 135-153.
- Weinberg, J., & Flinders, M. (2018). Learning for democracy: The politics and practice of citizenship education. *British Educational Research Journal*, 44(4), 573- 592.
- Winataputra. U.S. & Budimansyah, D. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Internasional*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Winataputra. U.S. (2001). *Jati Diri Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi*. Disertasi. Bandung: Pascasarjana PKn UPI.